

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut KBBI, konsolidasi adalah perbuatan untuk memperteguh atau memperkuat hubungan atau persatuan. Konsolidasi memiliki konteks yang berbeda-beda seperti konsolidasi perusahaan, konsolidasi personalia ataupun konsolidasi demokrasi, namun semuanya merujuk pada definisi yang sama. Konsolidasi demokrasi merujuk pada proses penggabungan berbagai elemen demokrasi untuk secara bersamaan dan terpadu memfasilitasi demokratisasi politik.¹ Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai proses institusionalisasi, yang semua lembaga negara maupun non-negara memiliki aturan dan melengkapi kriteria demokrasi yang sebelumnya tidak terpenuhi pada rezim terdahulu.²

Terdapat lima arena konsolidasi demokrasi menurut Linz & Stepan (1996) yakni *civil society* (masyarakat sipil), *political society* (masyarakat politik), *rule of law* (supremasi hukum), *state bureaucracy* (birokrasi negara) dan *economic society* (masyarakat ekonomi).³ Lima arena tersebut menjadi syarat penting agar konsolidasi demokrasi dapat memberikan stabilitas politik yang umumnya diperlukan untuk negara-negara transisi demokrasi seperti Indonesia. Penelitian

¹ Aji Deni. 2016. Konsolidasi demokrasi: perbaikan kualitas demokrasi di indonesia. Naufan pustaka. Hlm 10

² Ibid

³ Linz & Stepan. 1996. *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. jhu Press. Hlm 14

konsolidasi demokrasi umumnya membahas tantangan dalam proses konsolidasi demokrasi seperti hubungan sipil dan militer⁴, konglomerasi media⁵, pelaksanaan fungsi partai⁶, hubungan konsolidasi demokrasi dengan politik identitas⁷ dan kegagalan konsolidasi demokrasi yang berakibat pada *democratic decline*.⁸

Kondisi kemunduran demokrasi (*democratic decline*) tidak dapat dilepaskan dari peran instrumen konsolidasi demokrasi, salah satunya partai politik. Pelemahan demokrasi sering kali bermula dari ketidakmampuan partai politik menjalankan fungsi pengawasan akibat kooptasi kepentingan oligarki yang begitu kuat. Untuk memastikan kooptasi tersebut berjalan efektif dan meminimalisir resistensi dari arus bawah, elit penguasa perlu menciptakan struktur partai yang solid dan terkendali penuh. Kebutuhan akan stabilitas struktur inilah yang mendorong urgensi konsolidasi partai politik, yang terdapat mekanisme formal dan informal organisasi dimanfaatkan untuk mengunci loyalitas dan menutup celah bagi aktor alternatif yang berpotensi mengganggu dominasi elit lama. Oleh karena itu, penting untuk membahas konsolidasi partai politik sebagai salah satu determinan konsolidasi demokrasi.

⁴ Yuzak et.al. 2025. Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1).

⁵ Valerisha, A. 2016. Dampak praktik konglomerasi media terhadap pencapaian konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15-32.

⁶ Kurniawan, F., & Handayani, R. S. 2022. Masalah pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(2), 128-145.

⁷ Erinaldi. 2024. Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1-13.

⁸ Marcus Mietzer. 2025. Flirting with autocracy in Indonesia: Jokowi's majoritarianism and its democratic legacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 44(3): 366-384

Konsolidasi partai politik artinya proses penguatan kapasitas dan struktur partai politik, baik internal maupun eksternal. Konsolidasi partai politik juga dikenal sebagai *party Institutionalization* atau pelebagaan partai politik. Sejalan dengan hal tersebut, Basedau dan Stroh dalam Babas & Hidayat mendefinisikan pelebagaan partai sebagai proses partai politik peserta pemilu mengalami peningkatan atau stabilitas serta nilai keorganisasian serta terdiri dari aspek eksternal dan internal.⁹ Harmel & Svasand menjelaskan bahwa pelebagaan partai adalah proses memperoleh sifat-sifat organisasi mapan yang bernilai pada dirinya sendiri, serta mendapatkan persepsi dari pihak lain bahwa partai tersebut memang demikian.¹⁰

Proses tersebut membutuhkan berbagai dimensi agar berhasil. Basedau dan Stroh dalam Babas & Hidayat menjelaskan setidaknya ada empat dimensi dalam pelebagaan partai yakni *roots in society* (akar sosial di masyarakat), *autonomy* (otonomi), *level of organization* (tingkat organisasi) dan *coherence* (koherensi/kekompakan internal).¹¹ Pelebagaan partai menurut Harmel & Svasand terdiri dari dua dimensi yakni *internal institutionalization* (institusionalisasi internal), *external institutionalization* (institusionalisasi eksternal) dan *objective durability* (daya tahan partai yang objektif).¹² Sedangkan Fortunato

⁹ Babas & Hidayat. 2024. Proposing The Importance Of The "Compromise Ability" Component In The Institutional Dimension: A Study Of The National Democratic Party (NasDem). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan): Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (Lpp) Mandala*, 8(4) hlm 2618

¹⁰ Harmel & Sväsand (Eds.). 2019. *Institutionalisation of political parties: Comparative cases*. ECPR Press hlm 13

¹¹ Babas & Hidayat op.cit hlm 2619

¹² Harmel & Svasand, op.cit. hlm 14-19

dan Michelangelo menggunakan indikator *political party institutionalization* (PPI) untuk melihat pelebagaan partai yang terdiri dari *Decisional autonomy (internal/external)* (Otonomi pengambilan keputusan), *Durability (objective)* (Daya tahan organisasi), *Routinization (Rutinisasi) (internal)*, *Reification (external)* (penjelmaan dengan lingkungan luar) dan *Rootedness (external)* (keterakaran sosial).¹³

Berangkat dari berbagai pendekatan tentang pelebagaan partai yang menekankan pentingnya akar sosial, otonomi, durabilitas, hingga rutinisasi proses internal dan eksternal, jelas bahwa pelebagaan partai merupakan fondasi penting bagi stabilitas perilaku politik partai. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih berhenti pada tataran institusional dan belum banyak mengaitkannya secara langsung dengan bagaimana kekuasaan dikelola dan dipertahankan di tingkat lokal. Di sinilah kebaruan penelitian ini yakni pelebagaan partai tidak hanya membentuk karakter organisasi, tetapi juga turut menentukan bagaimana elit lokal mengonsolidasikan kekuasaannya dalam konteks desentralisasi. Melalui fokus pada konsolidasi kekuasaan lokal, penelitian ini menawarkan perspektif yang jarang diteliti sebelumnya, yaitu menelusuri bagaimana tingkat pelebagaan partai saling berkaitan dengan strategi, manuver, dan dominasi elit lokal dalam mempertahankan atau memperluas pengaruh politik mereka.

¹³ Fortunato & Michelangelo. 2019. Definitions and measures of party institutionalization in new personal politics: The case of the 5 Star movement. *Zeitschrift für vergleichende politikwissenschaft*, 13(2) hlm 225

Konsolidasi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari peran elit lokal dalam dinamika politik. Elite lokal sebagai konsekuensi dari adanya desentralisasi berhasil membuka ruang untuk membentuk, mengonsolidasikan dan memonopoli kekuasaan di tingkat lokal dengan berbagai mekanisme secara formal maupun informal.¹⁴ Firman menjelaskan elit lokal memiliki peran signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal.¹⁵ Namun, sirkulasi elit lokal seringkali mengalami penghambatan karena elit yang berkuasa akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Fitri dan Wawan mencontohkan sirkulasi elit ini di Kabupaten Kepulauan Sula dengan keluarga Mus sebagai elit yang berkuasa memiliki cara untuk mempertahankan kekuasaannya yakni melalui kooptasi kekuasaan di internal partai politik dan jalur birokrasi.¹⁶

Penelitian terdahulu telah membahas konsolidasi demokrasi, konsolidasi elit, konsolidasi partai politik dan konsolidasi kekuasaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Konsolidasi partai politik umumnya membahas

¹⁴ Elite adalah sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat yang biasanya memegang posisi penting dalam pemerintahan, partai politik dan lembaga lainnya. Elit memiliki kekuasaan yang tidak proporsional karena status, kekayaan atau keahlian mereka, dan memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan serta keputusan politik.

¹⁵ Firman. 2018. Desentralisasi dan monoisme masyarakat (praktek elit lokal melanggengkan dominasi). *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 3(2), 115-127.

¹⁶ Fitri & Wawan. 2020. Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 70-85

permasalahan fungsi partai politik¹⁷, pentingnya institusionalisasi partai politik¹⁸ dan penguatan kader untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah.¹⁹ Berbeda dengan penguatan kaderisasi konvensional, konsolidasi NasDem di Kota Padang lebih mencerminkan strategi bertahan hidup yang cepat dan pragmatis. Hal ini menjadi *entry point* analisis dalam penelitian ini. Melihat langkah pragmatis yang diambil dengan menarik masuk elit petahana dan kekuatan modal pengusaha untuk memulihkan infrastruktur partai yang sempat lumpuh pasca Pemilu 2019. Jika partai politik mapan umumnya memanfaatkan akses sumber daya pemerintahan, Partai NasDem mengandalkan restrukturisasi internal yang solid sebagai fondasi untuk menangkap peluang elektoral. Kebaharuan penelitian ini berfokus pada konsolidasi yang dilakukan partai politik di tingkat lokal sebagai upaya dalam memperoleh keuntungan elektoral pasca kekalahan dalam pemilihan umum tanpa dukungan dominasi birokrasi.

Konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari bagaimana partai politik memanfaatkan posisi strategis, jaringan elite, dan sumber daya pemerintahan untuk memperkuat basis dukungan pasca pemilihan umum. Sebagai contoh Partai Gerindra di beberapa daerah memanfaatkan jabatan kepala daerah atau jejaring politik lokal untuk memperluas simpati publik melalui

¹⁷ Kurniawan, F., & Handayani, R. S. op.cit

¹⁸ Ivann. 2023. Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 11-20.

¹⁹ Arief Zaafril Razaqtiar. 2016. Peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah: Studi upaya partai Golkar dalam memenangkan pasangan calon Juliyatmono-Rohadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. *Jurnal Politik Muda*, 5(3), 353-361.

kebijakan diklaim sebagai bagian dari komitmen politik Gerindra atau dikaitkan dengan narasi keberhasilan program pusat seperti Makan Begizi Gratis (MBG).²⁰ PDIP juga menunjukkan pola konsolidasi serupa dengan mengaktifkan struktur partai hingga tingkat ranting, melakukan kegiatan komunitas seperti kerja bakti, menggaet berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemuda, tokoh agama, petani dan nelayan, hingga advokasi kebijakan lokal yang diposisikan sebagai bukti kedekatan partai dengan rakyat kecil.²¹ Praktik-praktik ini merupakan indikator penting dari konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal, karena menunjukkan bagaimana partai memanfaatkan sumber daya formal maupun informal untuk mempertahankan dominasi, mengamankan loyalitas pemilih, dan membuka jalan bagi keuntungan elektoral di periode berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai salah satu arena konsolidasi demokrasi, partai politik merupakan kunci keberhasilan akselerasi konsolidasi di Indonesia.²² Partai politik memiliki sejarah panjang di Indonesia sebagai mesin penggerak demokrasi pasca Orde Baru. Konsekuensi dari adanya desentralisasi kekuasaan, jumlah partai politik di Indonesia pun tiap tahun kian meningkat. Muncul elit-elit baru yang ingin memperoleh kekuasaan dari kontestasi elektoral dengan membentuk partai politik

²⁰ Website Gerindra. 2025. diakses dari <https://www.fraksigerindra.id/sufmi-dasco-dorong-partisipasi-warga-tangerang-selatan-dalam-menyukseskan-program-mbg/> pada 12 Desember 21.00 WIB

²¹ Pega & Leda. 2025. Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Memenangkan Lima Kursi DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilu 2024. Jurnal Sosial dan Pemerintahan (JSP), 1(1), 41-52.

²² Jessica, op.cit hlm 30

baru. Salah satu partai politik baru di Indonesia adalah Partai Nasional Demokrat atau yang lebih dikenal sebagai Partai NasDem.²³

Partai NasDem dalam skala nasional memiliki tren kenaikan suara yang cukup signifikan. Memulai dari Pemilihan Umum Tahun 2014, Partai NasDem mendapatkan 35 kursi di DPR RI dan menjadi satu-satunya partai baru yang mendapatkan kursi di Senayan. Konsistensi Partai NasDem dalam mendukung Jokowi berefek positif terbukti dari perolehan suara yang naik kurang lebih empat juta suara dan mendapatkan 59 kursi di DPR RI Tahun 2019. Pemilu 2024, Partai NasDem dapat dikatakan mengambil langkah yang berani dengan mengusung Anies sebagai calon presiden yang justru didukung oleh Prabowo dan merupakan lawan politik saat itu. Namun pencalonan tersebut meningkatkan perolehan kursi di DPR menjadi 69 kursi dan meningkatnya popularitas Partai NasDem khususnya di Sumatera Barat.

Di Sumatera Barat, dinamika partai politik menjadi salah satu topik yang menarik dikarenakan dominasi partai politik sangat cair dan mudah berubah. Partai dominan yang terus berganti di Sumatera Barat menunjukkan bahwa Partai NasDem memiliki tantangan tersendiri untuk memperoleh suara di wilayah ini.

²³ Partai NasDem berawal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat yang dipimpin oleh Surya Paloh. Kelahiran Partai NasDem sangat berkaitan dari visi dan misi utama ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan dan memajukan fungsi pemerintahan Indonesia pada cita-cita proklamasi 1945. Partai ini terus mengusung restorasi Indonesia dengan empat cakupan yakni memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Meskipun berdiri sejak tahun 2011, Partai NasDem dalam dua tahun berhasil menjadi salah satu partai baru yang termasuk sebagai partai peserta pemilu pada tahun 2014 dan menjadikannya satu satunya partai baru yang memperoleh kursi di legislatif.

Partai NasDem sebagai partai baru bersaing dengan partai-partai lain yang lebih dahulu berkontestasi dan memiliki suara di Sumatera Barat seperti PKS dan Gerindra.

Tabel 1.1
Partai Politik Dominan di Sumatera Barat Tahun 2009-2024

Tahun	Partai Dominan	Jumlah Kursi
2009	Demokrat	14
2014	Golkar	9
2019	Gerindra	14
2024	PKS	10

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sumatera Barat merupakan daerah yang menurut banyak pakar merupakan masyarakat yang memiliki alasan rasional dalam memilih.²⁴ Hal tersebut menjadi peluang bagi partai baru seperti NasDem untuk mendapatkan posisi di daerah-daerah khususnya di Sumatera Barat. Pencalonan Anies menjadi momentum bagi Partai NasDem untuk mendapatkan suara dari pemilih rasional tersebut. Momentum tersebut dapat dinilai berhasil, dilihat dari naiknya perolehan suara Partai NasDem khususnya Kota Padang. Di Kota Padang, Partai NasDem berhasil meraih kursi yang signifikan pada tahun 2024 sebanyak 7 kursi dari yang sebelumnya hanya 1 kursi di tahun 2019.

Tabel 1.2
Perolehan Suara Partai NasDem di Kota Padang Tahun 2014-2024

Tahun	Jumlah Kursi
2014	4
2019	1
2024	7

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

²⁴ Aufa Rizky. 2025. Coattail Effect Anies Baswedan Terhadap Peningkatan Perolehan Suara Partai NasDem Di Kota Padang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Skripsi. Padang: Fisip Universitas Andalas hlm 83

Pencapaian tersebut bukan tanpa tantangan. Sebagai partai yang termasuk koalisi Jokowi dari tahun 2014-2019, Partai NasDem memiliki kesulitan dalam mendapatkan posisi di Kota Padang. Meskipun mendapatkan empat kursi pada tahun 2014 di Kota Padang, penurunan suara pada tahun 2019 tidak dapat dipungkiri berdampak dari kuatnya kedekatan NasDem dengan Jokowi.²⁵ Hal tersebut juga diperkuat dari pernyataan Syamsu Rizal sebagai Sekretaris Partai NasDem di Kota Padang²⁶:

“Waktu itu kan kita memberikan dukungan support untuk Jokowi. Sosok yang memang sebenarnya kita sadari dan kemudian terbukti kurang bisa diterima oleh masyarakat Minangkabau. Sehingga partai menjadi korban, kenapa saya katakan korban Aufa karena saat itu kita punya empat kursi di DPRD terjun bebas menjadi satu kursi. Jadi itu dominan karena memang masih lekat persepsi publik bahwa partai ini, ini calon presiden yang diusung”.

Sebagai upaya konsolidasi, Partai NasDem di Kota Padang memanfaatkan isu Anies sebagai *political leadership* yang sesuai dengan masyarakat Kota Padang. Posisi NasDem pada tahun 2019 sebagai pendukung garis keras Jokowi berkaitan dengan sehingga konsolidasi dapat dikatakan lemah sebelum mengusung Anies. Manuver yang dilakukan Partai NasDem menunjukkan adanya responsivitas terhadap pasar pemilih khususnya di Kota Padang. Hal tersebut menyebabkan NasDem Kota Padang berhasil menjawab keinginan masyarakat Minangkabau

²⁵ Andi Muhammad Sakti, et.al. 2020. Strategi kampanye partai nasionalis: pengalaman partai NasDem pada pemilu 2019. *Jurnal Politik Profetik*.

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsu Rizal sebagai sekretaris DPD Partai NasDem Kota Padang pada 6 Januari 2025

yang melihat ketokohan pada Anies. Pencalonan Anies Baswedan hanyalah membuka struktur peluang politik. Namun, konversi popularitas Anies menjadi kursi legislatif sepenuhnya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur partai. Tanpa adanya rekrutmen caleg petahana (seperti Osman Ayub) dan dukungan logistik yang kuat (para pengusaha), efek ekor jas Anies hanya akan berhenti pada popularitas Pilpres tanpa berdampak pada perolehan kursi DPRD. Dengan memilih aspirasi mayoritas pemilih di Kota Padang, Partai NasDem melakukan responsivitas partai yang merupakan bentuk dari *external institutionalisation*.²⁷ Selain itu, modalitas yang dimiliki oleh Partai NasDem Kota Padang tidak dapat dilepaskan dari anggota legislatif yang merupakan petahana pada pemilihan sebelumnya seperti Osman Ayub. Meskipun Partai NasDem memanfaatkan Anies dalam memperbaiki citra partai politiknya di Kota Padang, sosok Osman Ayub adalah figur elit yang tidak dapat dilepaskan dalam menjelaskan kemenangan Partai NasDem pasca Pemilu 2019.

Selain memanfaatkan Anies sebagai *external institutionalisation* dalam konsolidasi, Partai NasDem Kota Padang juga melakukan pendekatan dengan kekuatan informal Minangkabau seperti LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau).²⁸ Sebagai partai yang dikenal nasionalis dan dekat dengan pemerintahan, posisi Partai NasDem pada Pemilu 2019 menjadi tidak strategis dan

²⁷ Linz & Stepan. Op.Cit hlm 8

²⁸ Demokratis. 2023. H. Alfi Beben, SH Dampingi Anies Rasyid Baswedan di Acara LKAAM diakses dari <https://demokratis.co.id/h-alfi-beben-sh-dampingi-anies-rasyid-baswedan-di-acara-lkaam/> pada 3 Desember 2025 Pukul 23.00 WIB

menyebabkan hanya mendapatkan satu kursi. Melalui LKAAM, Partai NasDem merangkul tokoh adat yang paling berpengaruh bagi masyarakat Minangkabau di Kota Padang. Strategi tersebut dapat diasumsikan sebagai bentuk *cultural broker*²⁹ (perantara budaya) bagi Partai NasDem yang sebelumnya dikenal sebagai partai pendukung Jokowi untuk memberikan legitimasi adat bagi calon presiden yang diusung.³⁰

Meskipun Anies menjadi salah satu faktor konsolidasi Partai NasDem menguat setelah pemilu 2019, faktor masing-masing calon terpilih tidak dapat dilepaskan. Aufa menjelaskan bahwa efek Anies dirasakan oleh Partai NasDem, tetapi kemenangan masing-masing calon tergantung dari kemampuan calon tersebut.³¹ Hal ini berkaitan dengan bagaimana calon-calon legislatif dari Partai NasDem Kota Padang memiliki latar belakang pengusaha seperti Fautiaz Fauzi dan Argi Finalo. Melihat peluang yang didapatkan setelah pencalonan Anies, banyak pengusaha yang kemudian mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai NasDem.

Konsolidasi Partai NasDem juga dilakukan dengan melibatkan ahli atau pengamat politik untuk memperkuat kemampuan anggota partai dalam memikat pemilih. Partai NasDem bersama Ilham Azre sebagai peneliti Spektrum Politika Kota Padang membekali pengurus dan kader dengan ilmu politik agar

²⁹ *Cultural Broker* merujuk pada orang atau kelompok yang menjembatani kelompok tradisional atau lokal dengan kekuasaan formal pemerintahan (Stovel & Shaw, 2012)

³⁰ Stovel, & Shaw. (2012). *Brokerage. Annual review of sociology*, 38(1) hlm 150

³¹ Aufa. Op.cit hlm 66

meningkatkan wawasan dan kualitas calon anggota legislatif.³² Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan pengurus sebagai motor penggerak penting dalam internal partai politik. Penanaman pengetahuan dan konsolidasi internal tersebut bukan insidental, melainkan dilakukan secara rutin. Berbagai sumber dari media sosial resmi NasDem Kota Padang menunjukkan sejumlah kegiatan penguatan internal secara rutin.



³² Mimbarsumbar. Peneliti Utama Spectrum Politika Institute, Ilham Aldelano Azre Berbagi Ilmu Dengan Kader NasDem Padang diakses dari <https://mimbarsumbar.id/peneliti-utama-spectrum-politika-institute-ilham-aldelano-azre-berbagi-ilmu-dengan-kader-NasDem-padang/> pada 13 Januari 2026



Sumber: Instagram (@nasdempadang)

Gambar 1.1 Konsolidasi yang dilakukan Partai NasDem Kota Padang secara rutin

Berdasarkan data tersebut, Partai NasDem menggabungkan dua dimensi konsolidasi partai politik yakni rutin dan penanaman nilai. Menurut Harmel dan Svasand, penanaman nilai yang dilaksanakan secara rutin menunjukkan kematangan partai politik dalam mempertahankan eksistensinya.³³ Stabilitasnya Partai NasDem dalam mempertahankan kadernya dapat dianggap sebagai indikator dari adanya *internal value infusion* (infuse nilai internal).³⁴ Pemilihan wilayah seperti

³³ Harmel & Svasand, op.cit hlm 17

³⁴ Ibid

Kuranji dan Bungus Teluk Kabung dalam konsolidasi tersebut menunjukkan strategi partai yang bekerja secara spesifik menyasar basis suara rasional atau massa mengambang (*floating mass*). Konsolidasi struktural ini dirancang agar sejalan dengan karakteristik pemilih di kantong-kantong suara tersebut.

Selain konsolidasi dari internal dan eksternal partai politik, Partai NasDem Kota Padang juga memanfaatkan kelemahan partai pesaing seperti PKS dan Gerindra. Melihat dari turunnya perolehan kursi yang didapatkan PKS dari sebelumnya 9 kursi menjadi 7 kursi dan Gerindra yang sebelumnya 11 kursi menjadi 7 kursi menunjukkan bahwa Partai NasDem berhasil mengambil sebagian suara dari *floating mass* yang sebelumnya digunakan untuk memilih PKS dan Gerindra. Hal ini diperkuat dari pernyataan Syamsu Rizal³⁵:

“Pemilih Kota Padang itu dominan menurut saya yang massa mengambang *floating mass*. Kalau yang basis itu yang betul-betul bisa dianggap basis partai itu PKS. Kalau basis masa tidak peduli apa yang terjadi mau gempa mau banjir dia tetap milih PKS. ... Saya merasa belum pas bahwa kota ini ada pemilih basis dari partai tertentu”.

Penjelasan Sekretaris Partai NasDem tersebut menempatkan beban kekalahan 2019 pada faktor eksternal (Jokowi). Hal ini sejalan dengan analisis Edi Indrizal yang menyebut koalisi Jokowi terkena dampak negatif di Sumbar.³⁶ Namun, untuk menjelaskan kebangkitan di 2024, klaim kesuksesan konsolidasi

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsu Rizal sebagai sekretaris DPD Partai NasDem Kota Padang pada 6 Januari 2025

³⁶ TagarId. 2019. Penyebab Jokowi Kalah Telak di Sumatera Barat diakses dari <https://www.tagar.id/penyebab-jokowi-kalah-telak-di-sumatera-barat> pada 12 Januari 2026

perlu diuji secara objektif. Fakta bahwa PKS sebagai sesama pengusung Anies justru mengalami stagnasi kursi menunjukkan bahwa variabel 'Anies' saja tidak cukup. Kenaikan drastis NasDem lebih terindikasi berkorelasi dengan masuknya gerbong logistik dan tokoh petahana yang membawa suara pribadi mereka, sebuah fenomena yang mengindikasikan strategi pragmatis daripada sekadar soliditas mesin partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya memanfaatkan arena konsolidasi, penguatan kualitas kader juga menjadi langkah penting konsolidasi partai.

Kondisi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari Fadly Amran sebagai penghubung antara momentum nasional dengan kesiapan struktur partai di Kota Padang. Sebagai ketua DPW Partai NasDem Sumatera Barat, Fadly Amran memiliki peran dalam menciptakan strategi untuk menghadapi Pemilu 2024. Hal tersebut dibuktikan dari upaya Fadly Amran dan jajaran pengurus dalam mengambil langkah strategis konsolidasi terhadap seluruh dapil di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.³⁷ Melalui restrukturisasi organisasi di bawah komando DPW, Partai NasDem mampu memastikan bahwa gairah politik pemilih di Sumatera Barat tidak hanya berhenti pada popularitas figur presiden, melainkan diakomodasi ke dalam mesin partai yang solid hingga ke tingkat akar rumput untuk memenangkan kontestasi legislatif lokal.

³⁷ Padek Jawapos. 2023. Diakses <https://padek.jawapos.com/rakyat-memilih/2363766286/fadly-amran-pacu-semangat-caleg-nasdem> pada 2 Maret 2026

Berdasarkan berbagai data tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa lonjakan suara signifikan Partai NasDem di Kota Padang pada Pemilu 2024 bukanlah hasil otomatis dari *coattail effect* Anies Baswedan. Fakta bahwa partai pendukung Anies lainnya (seperti PKS) justru mengalami penurunan kursi membuktikan bahwa faktor figur Presiden tidak linear dengan hasil legislatif. Oleh karena itu, lonjakan suara NasDem adalah hasil dari strategi konsolidasi yang kuat dalam mengapitalisasi momentum tersebut melalui rekrutmen elit pragmatis, penguatan wawasan kader dan penguasaan jaringan logistik lokal.

Asumsi ini dibangun di atas premis bahwa NasDem berhasil mengintegrasikan konsolidasi melalui rekrutmen elit pragmatis (seperti tokoh petahana dan pengusaha) dan menambah wawasan dan pengetahuan terkait pemilihan dengan konsolidasi eksternal yang responsif terhadap dinamika politik Kota Padang, yakni dengan memanfaatkan momentum pergeseran dukungan publik dari partai dominan lama (Gerindra dan PKS) serta merangkul legitimasi adat melalui LKAAM. Selain dinamika eksternal politik, rekrutmen elit dari tokoh petahana dan pengusaha menjadi salah satu bentuk adanya *internal institutionalization* menurut Harmel & Svasand. Daya tahan yang dialami Partai NasDem Kota Padang yang mengalami suara “naik-turun” juga dapat diasumsikan sebagai *Objective Durability*.

Dengan kata lain, kemenangan NasDem adalah bentuk keberhasilan partai dalam memanfaatkan kesempatan politik yang terbuka akibat melemahnya dominasi kompetitor, yang kemudian dikapitalisasi melalui penguatan mesin partai

yang jauh lebih solid dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Berdasarkan asumsi tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana konsolidasi Partai NasDem di Kota Padang pasca Pemilu 2019 dilakukan dalam menghadapi Pemilu 2024?”.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki batasan tertentu. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan proses konsolidasi yang dilakukan Partai NasDem di Kota Padang pasca Pemilu 2019, khususnya dalam bentuk institusionalisasi internal, institusionalisasi eksternal, serta daya tahan objektif (*objective durability*) partai. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan secara langsung hubungan antara konsolidasi partai dengan peningkatan perolehan kursi partai politik di parlemen. Dengan kata lain, kenaikan suara dan kursi NasDem pada Pemilu 2024 ditempatkan sebagai konteks dan latar belakang yang mendasari pentingnya kajian konsolidasi tersebut, bukan sebagai variabel yang secara langsung diuji pengaruhnya terhadap strategi konsolidasi yang dijalankan. Batasan ini penting mengingat perolehan kursi partai politik turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini, seperti sistem pemilu proporsional terbuka, dinamika politik lokal antar-dapil, serta preferensi pemilih yang bersifat individual.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Strategi Partai NasDem dalam melakukan konsolidasi di Kota Padang pasca Pemilu 2019 dengan menganalisis upaya penguatan kader dan

rekrutmen elit pengusaha sebagai institusionalisasi internal, memanfaatkan momentum Anies Baswedan sebagai institusionalisasi eksternal serta melihat daya tahan objektif (*objective durability*) partai tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu politik khususnya dalam menjelaskan konsolidasi kekuasaan dengan analisis menggunakan teori konsolidasi demokrasi Linz dan Stepan (1986) dalam konteks politik lokal dan dampaknya terhadap peningkatan suara partai dalam pemilihan legislatif.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi wawasan baru bagi partai politik dalam konsolidasi sebagai upaya meningkatkan peluang kemenangan elektoral, bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

